



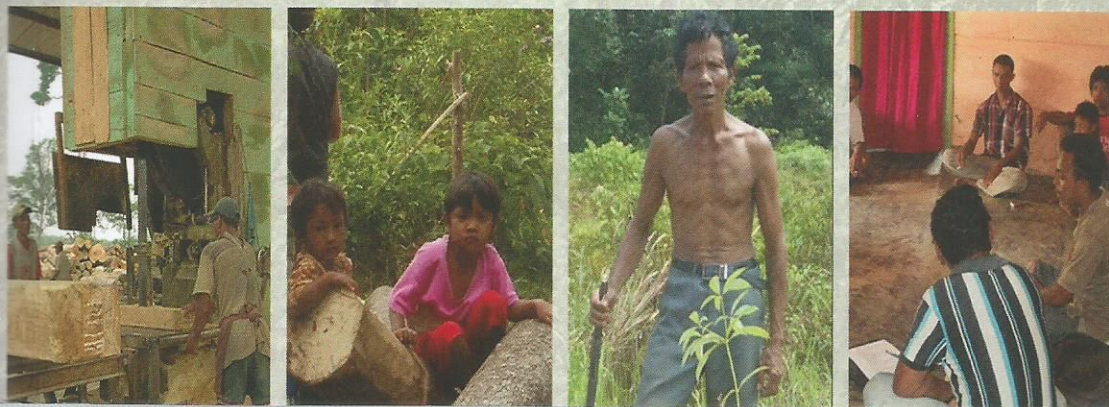
Andestian Wijaya, Hardjanto, Yulius Hero

HUTAN RAKYAT PULAI

Ekonomi & Kelembagaan

**SAMBUTAN oleh Direktur Jenderal PSKL :
Dr. Ir. Hadi Daryanto, D.E.A**

PENGANTAR oleh H. IWAN WORANG



HUTAN RAKYAT PULAI
Ekonomi dan Kelembagaan

Andestian Wijaya, Hardjanto, Yulius Hero

ISBN 978-602-18388-8-4

Editor: Arie Herdiyanto

Penyunting: M. Ali Wijaya

Desain Sampul & Tata Letak: Hendra Jaya

Foto Sampul: Andestian Wijaya & M. Ali Wijaya

Diterbitkan oleh Terbit Press

Komplek IPB 2 - Sindangbarang

Jalan Saturnus, Blok G - 4

Bogor, Jawa Barat - 16680

www.terbitpress.ml

E-mail: terbitpress@gmail.com

Cetakan Pertama, September 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindakan pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan.

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Dr. Ir. Hadi Daryanto, D.E.A #ix

Kata Pengantar H. Iwan Worang #xi

Pengantar Penulis #xiii

Pendahuluan #1

Pendekatan Dalam Memahami Hutan Rakyat #23

Ekonomi Hutan Rakyat Pulau #45

Kelembagaan Hutan Rakyat Pulau #107

Keputusan Petani Mengusahakan Hutan Rakyat #157

Kesimpulan dan Saran #165

Daftar Pustaka #171

Indeks #189

Tentang Penulis #197

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad B, Purwanto RH. 2014. Peluang adopsi sistem *agroforestry* dan kontribusi ekonomi pada berbagai pola tanam hutan rakyat di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Bumi Lestari*. 14 (1): 15-26.
- Andersson K, Ravikumar A, Mwangi E, Guariguata M, Nasi R. 2011. *Menuju Bentuk Kerjasama yang Lebih Bekerjasama*. Bogor (ID): CIFOR.
- Anonim. 2014. *Block Pencil Progression Picture*. [Internet]. [Waktu dan tempat pertemuan tidak diketahui]. [diunduh 2014 May 21]. Tersedia pada: https://c1.staticflickr.com/9/8541/8942327215_0291f52192_z.jpg.
- Arinana dan Diba F. 2009. Kualitas kayu Pulai (*Alstonia scholaris*) terdensifikasi (sifat fisis, mekanis dan keawetan). *Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan*. 2 (2): 78-88.
- Asmaliyah, Utami S dan Yudhistira. 2006. Efikasi Beberapa Jenis Insektisida Terhadap Hama Pemakan Daun pada Tanaman Pulai Darat. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*. 3 (2): 83-91.

1

PENDAHULUAN

Pengantar

Pada bagian ini, akan dijelaskan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, kemudian menjelaskan juga secara umum tentang Hutan Rakyat Pulai dan perkembangan industri kehutanan dalam memanfaatkan bahan baku kayu bulat. Selanjutnya akan diuraikan tentang ekonomi dan kelembagaan yang berhubungan dengan tema penelitian, disertai dengan beberapa pertanyaan fundamental, yang merupakan dasar dari penulisan buku ini.

Supply - Demand Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Kondisi yang sedang terjadi dalam dunia industri kehutanan saat ini adalah munculnya fenomena kesenjangan (*gap*), yaitu kesenjangan antara kapasitas industri terpasang dengan kemampuan sumber daya alam dalam menyediakan bahan baku industri pengolahan kayu. Fenomena tersebut juga menjelaskan bahwa defisit produksi kayu bulat terhadap kebutuhan pasokan bahan baku industri semakin besar.

Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK) pada tahun 2014 mencatat bahwa kebutuhan akan bahan baku kayu bulat untuk Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dalam skala nasional, dengan kapasitas di atas 6000 m³/tahun adalah sebesar 98,19 juta m³/tahun, dimana tercatat ada sekitar 401 unit industri. Untuk realisasi pemenuhan kayu bulat nasional pada tahun 2014 hanya sebesar 48,25 juta m³ yang berasal dari berbagai sumber, yaitu kayu bulat hutan alam dari Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)/Izin Lain Sah (ILS), kayu dari perkebunan, kayu

Pendahuluan

dari Hutan Tanaman (HTI & Perhutani), kayu dari Hutan Rakyat (HR) dan kayu impor. Berdasarkan data tersebut, IPHHK mengalami kekurangan bahan baku sebesar 50%.

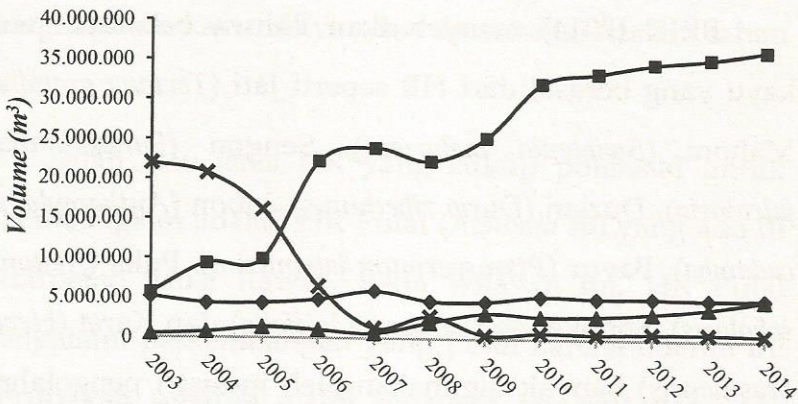
Dalam rangka mengatasi kekurangan bahan baku industri, diperlukan upaya untuk memanfaatkan dan mengefektifkan potensi sumber bahan baku kayu lain semaksimal mungkin. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu melalui ekstensifikasi Hutan Tanaman (HT), antara lain pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Rakyat (HR). Menurut Supriadi (2002), pembangunan HT dapat dilakukan melalui pengembangan HTI di dalam kawasan hutan dan pengembangan HR di luar kawasan hutan. Luas HTI dalam skala nasional adalah 10,54 juta ha dan realisasi penanaman kumulatif sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 58% atau sebesar 6,11 juta ha (Ditjen BUHT, 2014). Rochmayanto & Limbong (2013) menginformasikan bahwa potensi kayu untuk jenis akasia (*Acacia mangium*) dengan umur antara 4 - 5 tahun sebesar $\pm 123,55 \text{ m}^3/\text{ha}$.

Hutan Rakyat Pulau

HR juga mempunyai potensi cukup besar untuk menutupi kekurangan pasokan bahan baku industri (Maryudi, 2005), sedangkan Awang *et al.* (2007) menyatakan bahwa kayu rakyat memberikan kontribusi sebesar 30% dari ketersediaan kayu nasional. Data Ditjen BPDAS-PS (2011) menunjukkan bahwa luas HR nasional sebesar 3,6 juta ha, dengan perkiraan potensi *standing stock* sebesar 125,6 juta m³ serta potensi kayu siap panen sebesar 20,9 juta m³.

Data Ditjen BUK (2014) mengenai penggunaan kayu bulat yang bersumber dari hutan tanaman, baik yang berasal dari HTI dan HR menunjukkan tren positif selama satu dasawarsa terakhir (Gambar 1). Selama periode tahun 2003 - 2014, penggunaan kayu bulat yang bersumber dari HTI dan HR telah direalisasikan sebesar 68,53%, sedangkan untuk kayu bulat hutan alam telah direalisasikan sebesar 31,47%.

Pendahuluan



Sumber: Ditjen BUK tahun 2014

Gambar 1 Tren Pemanfaatan Kayu Bulat oleh IPHHK dengan Kapasitas di atas 6.000 m³/tahun

Keterangan:

(—▲—) Kayu rakyat

(—■—) Kayu HTI

(—◆—) Kayu HPH

(—×—) Kayu IPK/ILS

Berdasarkan uraian dan data-data tersebut di atas, terlihat bahwa bahan baku kayu dari hutan tanaman (HTI dan HR) sangat potensial untuk mencukupi kekurangan produksi kayu dari hutan alam. Kualitas kayu dari hutan rakyat secara umum memang masih rendah dibandingkan kayu hutan alam. Sebagian besar jenis kayu rakyat memerlukan perlakuan tertentu sebelum diolah. Namun perlu diakui, bahwa kayu rakyat mempunyai potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan.

Hutan Rakyat Pulau

BRIK (2014) menyebutkan bahwa beberapa jenis kayu yang berasal dari HR seperti Jati (*Tectona grandis*), Mahoni (*Swietenia mahagoni*), Sengon (*Paraserianthes falcata*), Durian (*Durio zibethinus*), Jabon (*Anthocephalus cadamba*), Bayur (*Pterospermum javanicum*), Pulau (*Alstonia scholaris*), Sonokeling (*Delbergia latifolia*) dan Karet (*Hevea brasiliensis*) banyak digunakan oleh industri pengolahan kayu untuk memproduksi *veneer*, *plywood*, *laminating board*, *bare core*, *engineering doors*, *packaging boxes*, *flooring*, *furniture*, *housing component* dan *pencil slate*.

Mengenal Hutan Rakyat Pulau

UU Nomor 41/1999 mendefinisikan bahwa HR yaitu "hutan yang terdapat di atas tanah yang dibebani hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai". Kepmenhut Nomor 49/1997 mendefinisikan HR yaitu "hutan yang dimiliki rakyat dengan luas minimal 0,25 ha dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan atau jenis lainnya lebih dari 50% dan atau tanaman tahun pertama sebanyak minimal 500 tanaman tiap hektar". Sedangkan Hardjanto (2000) secara singkat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan HR adalah hutan yang dalam penggunaan lahannya

Pendahuluan

menghasilkan kayu rakyat dan diusahakan dalam lahan milik.

Salah satu jenis HR yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah HR Pulai (*Alstonia sp*) yang ada di Kabupaten Musi Rawas. Pada wilayah ini, HR Pulai mengalami perkembangan yang pesat karena daerah ini merupakan sebaran alami tanaman tersebut dan juga tersedia pangsa pasarnya (Lukman *et al.*, 2012). Jenis Pulai Musi Rawas memiliki tingkat keragaman genetik terbesar di Indonesia (Hartati *et al.*, 2007).

Dahulu, Pulai merupakan tanaman liar dan dianggap gulma di perkebunan dan pekarangan masyarakat di Musi Rawas. Usahatani Pulai mulai mengalami perkembangan pesat pada tahun 1997, sejak adanya program Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) yang diprakarsai oleh industri slat pensil¹ PT. Xylo Indah Pratama (PT. XIP). Industri ini kemudian melakukan kerjasama penanaman Pulai dengan petani pemilik lahan

¹Slat pensil (*pencil slate*) adalah lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan memotong secara vertikal kayu gergajian (*sawn timber*) dan melalui proses pengawetan, pengeringan dan pengamplasan dengan ukuran panjang 185 mm, lebar 71-75 mm dan tebal 7,5 mm.

Hutan Rakyat Pulau

(Mayers & Vermeulen, 2002). Berdasarkan Informasi Balitbanghut (2004) dan Sumadi *et al.* (2006) bahwa jenis Pulau yang dikembangkan di Musi Rawas merupakan jenis endemik cepat tumbuh, yaitu Pulau Gading (*A. Scholaris* (L.) R.Br.) dan Pulau Darat atau Pulau Hitam (*A. Angustiloba* Miq.)

HR Pulau merupakan penyedia bahan baku utama industri slat pensil yang pemanfaatannya sangat besar di Musi Rawas (Mashudi, 2013). Suplai kayu Pulau untuk industri dipenuhi dari HR program KUHR monokultur dan Pulau yang berasal dari lahan perkebunan karet masyarakat (*agroforestry* Pulau-Karet). Menurut Maimunah (2014), kayu Pulau merupakan kayu kualitas terbaik untuk bahan baku pensil. Arinana & Diba (2009) menjelaskan bahwa kayu Pulau memiliki sifat mudah dikerjakan, dikeringkan, diawetkan dan mempunyai daya kembang susut yang sedang.

Kayu Pulau memiliki nilai ekonomi tinggi. Harga kayu Pulau (*log*) diameter 20 cm di tingkat pabrik rata-rata

Pendahuluan

Rp 500.000/m³ (Yuwono, 2006)². Di Yogyakarta, kayu Pulai dimanfaatkan untuk industri kerajinan topeng, sedangkan di Bali dimanfaatkan untuk industri kerajinan ukiran (Mashudi & Adinugraha, 2014). Kegunaan kayu Pulai lainnya yaitu sebagai barang kerajinan berupa papan tulis, lemari, korek api, hak sepatu, cetakan beton, peti mati dan pulp (Indartik, 2009).

Sejarah Pembangunan HR Pulai

Pada awalnya, bahan baku slat pensil atau pensil berasal dari jenis Jelutung (*Dyera costulata*) yang tumbuh di lahan perkebunan dan pekarangan masyarakat serta berasal dari hutan alam. Populasi tanaman ini lambat laun mulai berkurang karena makin maraknya kegiatan penebangan oleh masyarakat. Menurut hasil penelitian Nawir & Santoso (2005), terungkap bahwa tingginya intensitas tebangan menyebabkan pasokan bahan baku kayu Jelutung semakin sulit diperoleh.

² Hasil penelusuran tahun 2015, harga kayu Pulai (*log*) yang diterima di pabrik PT. XIP rata-rata adalah Rp 725.000/m³

Hutan Rakyat Pulau

Permasalahan kemudian muncul ketika PT. XIP mengembangkan tanaman Jelutung tanpa melibatkan peran masyarakat setempat. Kondisi perekonomian yang tidak menentu dan kebutuhan hidup yang terus bertambah, membuat masyarakat ingin memanfaatkan getah Jelutung pada areal milik PT. XIP secara ilegal dan cenderung bersifat destruktif. Pengalaman tersebut akhirnya membuat PT. XIP melakukan pendekatan yang berbeda. PT. XIP kemudian melakukan kerjasama pengelolaan tanaman Pulau dengan mengikutsertakan peran masyarakat. Pulau menjadi bahan baku utama slat pensil pengganti Jelutung dengan kualitas yang relatif sama.

Pulai semula merupakan tanaman liar, banyak tumbuh di pekarangan dan dianggap sebagai gulma di perkebunan karet masyarakat. Masyarakat mulai melirik pulai ketika PT. XIP mulai beroperasi pada sekitar tahun 90-an dan menggunakan Pulau sebagai bahan baku industri. Kayu Pulau awalnya dipasok dari pekarangan dan perkebunan karet masyarakat, baik Pulau yang hasil budidaya maupun Pulau yang tumbuh alami. Kebutuhan

Pendahuluan

bahan baku kayu Pulau yang terus meningkat, membuat PT. XIP mulai memikirkan jaminan pasokan bahan baku yang berkesinambungan. PT. XIP ingin membangun HR Pulau skala besar monokultur dan menerapkan pola kemitraan dengan petani pemilik Pulau di perkebunan karet.

Pada tahun 1997, PT. XIP memperoleh pinjaman modal Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) yang bersumber dari Dana Reboisasi (DR) Departemen Kehutanan (Kepmenhut Nomor 49/Kpts-II/1997 tentang Pendanaan dan Usaha Hutan Rakyat). Kredit diberikan selama daur tanaman Pulau (11 tahun). Pada awalnya seluruh kegiatan pembangunan HR dibiayai oleh industri, namun agar PT. XIP dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana KUHR, PT. XIP membangun kerjasama dengan petani/kelompok tani pemilik lahan dengan menggunakan sistem bagi hasil (50:50). Total sebanyak 1.729 petani yang tergabung dalam 47 kelompok tani berpartisipasi dalam skema KUHR melalui PT. XIP. Untuk memudahkan pengawasan dan koordinasi, PT. XIP

Pendahuluan

bahan baku kayu Pulau yang terus meningkat, membuat PT. XIP mulai memikirkan jaminan pasokan bahan baku yang berkesinambungan. PT. XIP ingin membangun HR Pulau skala besar monokultur dan menerapkan pola kemitraan dengan petani pemilik Pulau di perkebunan karet.

Pada tahun 1997, PT. XIP memperoleh pinjaman modal Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) yang bersumber dari Dana Reboisasi (DR) Departemen Kehutanan (Kepmenhut Nomor 49/Kpts-II/1997 tentang Pendanaan dan Usaha Hutan Rakyat). Kredit diberikan selama daur tanaman Pulau (11 tahun). Pada awalnya seluruh kegiatan pembangunan HR dibiayai oleh industri, namun agar PT. XIP dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana KUHR, PT. XIP membangun kerjasama dengan petani/kelompok tani pemilik lahan dengan menggunakan sistem bagi hasil (50:50). Total sebanyak 1.729 petani yang tergabung dalam 47 kelompok tani berpartisipasi dalam skema KUHR melalui PT. XIP. Untuk memudahkan pengawasan dan koordinasi, PT. XIP

Pendahuluan

terdiri atas 65% alang-alang (*Imperata cylindrica*) dan 35% semak belukar (Nawir & Santoso, 2005). Realisasi penanaman Pulai program KUHR seluas 5.014 ha dari target penanaman 10.000 ha. Belum tercapainya target penanaman disebabkan karena ada kekhawatiran yang beredar di masyarakat bahwa lahan kerjasama KUHR akan "diserobot" pihak PT. XIP. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah PT. XIP hanya ingin memanfaatkan lahan marjinal dengan dana DR dan bermitra dengan petani pemilik lahan (PT. XIP, 2011). Menurut Agus Cik (2004) yang diacu pada Asmaliyah *et al.* (2006) bahwa belum tercapainya target pembangunan HR skema KUHR PT. XIP juga disebabkan faktor lain, yaitu serangan hama pemakan daun (*C. glauculalis*) dan insektisida dengan bahan kimia *deltamerin* yang digunakan dalam skala persemaian tidak efektif membasmi hama. Lebih lanjut Asmaliyah *et al.* (2006) menginformasikan bahwa kumbang (*Cycotrachelus sp*) adalah jenis hama serangga baru yang menyerang daun tanaman Pulai milik PT. XIP di wilayah SP 5 Cekar.

Hutan Rakyat Pulau

Terkait dengan program KUHR, Hindra (2006) menjelaskan bahwa sejak tahun 2001 bantuan kredit KUHR tidak dapat dilanjutkan lagi karena Departemen Kehutanan selaku instansi yang berwenang, masih melakukan evaluasi terhadap permasalahan penyaluran dana. Menurut Nugroho (2010) penyaluran dana KUHR nasional selama periode tahun 1997 - 2000 sebesar 107,58 milyar rupiah dan hingga tahun 2010 belum terbayar. Terdapat tunggakan kredit KUHR sebesar 170,91 milyar rupiah, berupa tunggakan pinjaman pokok sebesar 105,82 milyar rupiah dan bunga sebesar 65,15 milyar rupiah. Dengan terbitnya PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, yang mengatur penyelenggaraan skim kredit melalui rekening pembangunan hutan dan diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan, penyaluran dana KUHR tersebut resmi dihentikan.

Dalam rangka pemanfaatan Pulau yang lestari maka PT. XIP berkomitmen memelihara dan menjaga sumber bahan baku, menjaga keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi sesuai persyaratan SFM. PT. XIP kemudian

Pendahuluan

melakukan kegiatan kerjasama dengan petani pemilik Pulau di lahan perkebunan karet dengan skema kemitraan (*agroforestry* Pulau-Karet). Sejak tahun 2007, total sebanyak 8.000 petani dan 3 kelompok tani telah tergabung dalam kerjasama kemitraan. Seluruh petani yang tergabung dalam kemitraan wajib mengikuti kriteria FSC yang telah disepakati bersama. Dalam rangka menjaga kelestarian bahan baku, PT. XIP juga memberikan bantuan bibit gratis kepada pemilik lahan untuk ditanam di kebun karet atau pekarangan masyarakat dan kawasan perlindungan setempat. Selama periode tahun 2006 - 2015, jumlah bibit yang telah dibagikan PT. XIP kepada petani sebanyak 166.960 bibit antara lain Pulau, Jabon dan Labu.

Kondisi yang terjadi saat ini, petani *agroforestry* Pulau-Karet terus mengalami perkembangan pesat karena didukung oleh keberadaan industri PT. XIP dan dipengaruhi faktor harga karet yang terus menurun. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, para petani bersedia untuk menanam Pulau walaupun mereka belum tergabung dalam program KUHR.

Ekonomi dan Kelembagaan

Dalam catatan penulis, studi tentang ekonomi dan kelembagaan HR Pulau masih jarang dilakukan. Kajian atau literatur yang terkait dengan ekonomi dan kelembagaan HR masih terbatas, oleh karena itu layak untuk dilakukan penelitian. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa kajian HR di Musi Rawas yang telah dilakukan yaitu persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan hutan HR pola kemitraan (Yuwono, 2006) dan kemitraan antara industri dan masyarakat dalam pembagunan hutan tanaman (Nawir & Santoso, 2005; Mayers & Vermeulen, 2002; Vermeulen *et al.*, 2003). Fokus penelitian adalah tentang analisis kelayakan finansial dan kelembagaan HR Pulau. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelayakan HR Pulau di tingkat petani, menganalisis kontribusi pendapatan usahatani HR terhadap total pendapatan petani, menganalisis kelembagaan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam mengusahakan HR. Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan dan dapat

Pendahuluan

dijadikan pedoman bagi pemangku kepentingan, khususnya dalam rangka pemenuhan bahan baku untuk industri pensil yang berkelanjutan. Diharapkan juga agar penelitian ini dapat menambah literatur akademik tentang ekonomi dan kelembagaan HR Pulai dan memperkaya khasanah intelektual di bidang kehutanan.

HR sebenarnya dapat dikembangkan untuk mengatasi kesulitan bahan baku kayu. HR Pulai di Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu HR yang sangat potensial untuk dikembangkan. Pengusahaan HR Pulai terus mengalami perkembangan, seiring meningkatnya kebutuhan bahan baku kayu. Pulai sangat cocok dengan kondisi iklim di wilayah Musi Rawas dan didukung dengan keberadaan industri kayu yang menggunakan Pulai sebagai bahan baku slat pensil. Pemilihan jenis Pulai untuk slat pensil didasarkan pada nilai ekonomi dan harga yang cukup tinggi di kalangan petani sebagai produsen. Pasokan kayu bulat Pulai saat ini dirasakan belum optimal memenuhi kebutuhan industri PT. XIP. Pasokan bahan baku kayu bulat Pulai hanya mampu dipenuhi 50% atau sebesar 30.340 m³/tahun dari

kebutuhan total industri selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2010 - 2014), sedangkan total kebutuhan bahan baku kayu bulat PT. XIP sebesar 57.000 m³/tahun (Ditjen BUK, 2014).

Lingkup kajian dalam penelitian ini hanya pada dua sub-sistem, yaitu *sub-sistem produksi* (struktur tegakan, hasil produksi dan budidaya) dan *sub-sistem kelembagaan* (aturan main dan organisasi). Sesungguhnya masih terdapat dua sub-sistem lagi yang mempengaruhi, namun tidak dilakukan penelitian yaitu *sub-sistem pemasaran* (sistem distribusi, struktur pasar, penentuan harga, perilaku pasar dan keragaan pasar) dan *sub-sistem pengolahan* (perlakuan yang mengubah bahan baku kayu bulat menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi).

Permasalahan pada *sub-sistem produksi* yaitu rendahnya nilai tukar (*term of trade*) yang diterima petani. Nilai tukar yang merupakan perbandingan manfaat dan biaya, belum mampu memberikan kesempatan kepada petani untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Awang *et al.* (2002) menyatakan bahwa permasalahan modal merupakan penyebab utama belum maksimalnya

Pendahuluan

usaha HR. Menurut penelitian Darusman & Hardjanto (2006), bahwa kontribusi pendapatan HR berkisar di bawah 10% dari pendapatan total petani dan dianggap sebagai pendapatan sampingan serta bersifat insidental.

Rendahnya nilai tukar yang diterima petani juga disebabkan oleh kurang berfungsinya kelembagaan, terutama kelembagaan yang dapat berperan dalam menaikkan kekuatan tawar-menawar. Secara umum, permasalahan pada *sub-sistem kelembagaan* adalah lemahnya kelembagaan di tingkat organisasi, SDM dan sistem manajemen (Hakim, 2010), serta belum dipahaminya nilai-nilai sosial, norma, aturan main dan organisasi (Rahmawati, 2004). Padahal, kelembagaan adalah faktor kunci dalam meningkatkan akses petani, terutama akses terhadap pasar (Hellin *et al.* 2009). Hal senada juga dikemukakan oleh Diniyati *et al.* (2008) bahwa kelembagaan merupakan aspek yang paling berpengaruh, HR akan sulit berkembang tanpa kelembagaan.

Beberapa Pertanyaan Fundamental

Secara khusus, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha petani HR Pulau dari aspek finansial, menganalisis kontribusi pendapatan usahatani HR terhadap total pendapatan petani, menganalisis kelembagaan HR dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani untuk mengusahakan HR. Diharapkan dari hasil analisis ini, akan diperoleh manfaat yang sesuai dengan kondisi setempat (*local specific*) dan dapat diimplementasikan di lapangan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa pertanyaan fundamental terkait dengan tema penelitian, yang nantinya akan berfungsi sebagai panduan dalam “menggiring” penulis untuk memperoleh dan menemukan jawaban, yaitu:

1. Bagaimana kelayakan usaha usahatani HR Pulau?
2. Berapa kontribusi pendapatan usahatani HR Pulau terhadap total pendapatan petani?
3. Bagaimana kelembagaan HR Pulau?

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan petani dalam mengusahakan HR Pulau?

Tujuan, Manfaat dan Ruang Lingkup

Penelitian ini secara garis besar menganalisis aspek ekonomi dan kelembagaan, dengan tujuan khusus yang ingin dicapai yaitu menganalisis kelayakan usahatani HR Pulau dan kontribusi pendapatan usahatani HR Pulau terhadap total pendapatan petani, menganalisis kelembagaan HR Pulau dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam mengusahakan HR.

Hasil penelitian dalam buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi tentang usahatani Pulau dan kontribusi pendapatan HR terhadap total pendapatan petani dan perekonomian desa. Buku ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti, akademisi dan pemerintah, khususnya dalam kajian tentang kelembagaan HR, sekaligus memberikan informasi tentang faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi petani dalam mengambil keputusan untuk mengusahakan HR.

Analisis yang diuraikan dalam buku ini lebih diarahkan pada penilaian tentang ekonomi dan kelembagaan yang mendukung pembangunan HR, sehingga menghasilkan keluaran yang berdampak dan memberikan manfaat bagi para pelaku HR. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah rumah tangga petani, kelompok tani dan para *stakeholder* yang berhubungan dengan pengusahaan HR, serta industri PT. XIP.

2

PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI HUTAN RAKYAT

Pengantar

Pada bagian ini akan dibahas proses pada saat melakukan riset di lapangan, dilengkapi dengan alur dan kerangka pikir dalam "menggali dan memahami" Hutan Rakyat Pulau. Selain itu, akan dijelaskan tentang metode pengambilan data dan contoh, kemudian diikuti dengan ringkasan singkat tentang wilayah dilakukannya riset serta analisa terhadap data tersebut. Beberapa alasan dilakukannya riset diuraikan dalam bagian ini dan didukung dengan keterangan mengenai alasan mengapa dilakukannya analisa ekonomi dan kelembagaan.

EKONOMI HUTAN RAKYAT PULAI

Pengantar

Pada bagian ini, akan dibahas secara mendalam terkait dengan pertanyaan fundamental yang telah diajukan di awal tulisan ini dan dilengkapi dengan analisis dan penjelasannya. Kemudian, akan dijelaskan beberapa bagian penting yang berhubungan erat dengan HR Pulau, diantaranya yaitu profil singkat lokasi penelitian, potensi HR di Kabupaten Musi Rawas, profil industri, sub-sistem dalam pengusahaan HR, kelayakan usaha HR, pendapatan dan pengeluaran petani dan tingkat kesejahteraan petani.

KELEMBAGAAN HUTAN RAKYAT PULAI

Pengantar

Pada bagian ini akan diuraikan kelembagaan dengan pendekatan Situasi, Struktur, Perilaku dan Kinerja. Situasi mencakup karakteristik tanaman Pulaui, produk Pulaui, biofisik desa penelitian dan sosial ekonomi masyarakat. Struktur menjelaskan aturan main dan organisasi petani monokultur maupun *agroforestry* Pulaui-Karet. Perilaku menggambarkan tingkah laku setiap *stakeholders* yang terlibat dalam pengusahaan HR Pulaui. Kinerja menjelaskan bukti/hasil pengusahaan HR oleh petani, bukti/hasil pemenuhan dan pengolahan bahan baku kayu bulat Pulaui oleh industri.

KEPUTUSAN PETANI MENGUSAHAKAN HUTAN RAKYAT

Pengantar

Pada bagian ini, dilakukan uji statistik untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang diduga berpengaruh terhadap keputusan petani untuk mengusahakan hutan rakyat. Alat bantu yang digunakan yaitu program SPSS 20. Tahapan uji statistik yang dilakukan yaitu menentukan variabel bebas dan variabel terikat yang dikategorikan. Dilakukan uji signifikansi parameter model awal, uji signifikansi parameter secara individual, uji kecocokan model dan membuat model persamaan regresi dan menentukan nilai probabilitas petani dalam mengusahakan HR Pulau.

6

KE Simpulan dan Saran

Pengantar

Pada bagian ini, akan dideskripsikan tentang kesimpulan dari penelitian yang lakukan di Hutan Rakyat Pulau. Kesimpulan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental yang telah dikemukakan pada bagian awal tulisan ini. Selanjutnya, disertakan saran terkait hasil dari penelitian ini dan dapat ditindaklanjuti melalui aksi nyata atau dilakukannya penelitian lanjutan. Tentunya, aksi dan penelitian lanjutan tersebut bisa untuk menyempurnakan, mendukung, mengkritik, membantah, ataupun memfalsifikasi hasil penelitian. Penulis menyadari bahwa di dalam dunia akademik dan sains, berlaku secara universal "hukum dialetika" yaitu ada tesis, ada antitesis, dan ada sintesis.